



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl.Wolter Monginsidi No.1 Telp : (0541)-6724936 Fax : (0541)-6724936

Website : www.dprdkutakartanegara.go.id E-mail : setwan@dprdkutakartanegara.go.id Kode Pos : 75511

NOTULENSI RAPAT

Tanggal : 17 Januari 2025

Tempat : Kementerian Investasi/BKPM Jakarta

Perihal : Rapat Kerja Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko di Kementerian Investasi/BKPM

RESUME KEGIATAN

Ketua Pansus DPRD Kab. Kutai Kartanegara (Eko Wulandau)	: <ul style="list-style-type: none">- Sambutan Ketua Pansus- Hj Martina- Hj Masniah- Ria Handayani- H Muhammad Hidayat- Rahmat Darmawan- DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara- Tujuan kita kesini ingin melakukan studi banding dan ingin mendapatkan informasi terkait perizinan untuk proses pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.- Dari berbagai kegiatan kami kunjungan kelapangan, banyak didapati pemasalahan dan kendala terkait dengan proses perijinan tersebut diantaranya, jaringan internet yang masih tidak merata di seluruh daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena proses perijinan ini berbasis online maka jaringan internet ini menjadi kebutuhan yang sifatnya wajib ada, sehingga ini menjadi kendala utama, kemudian masih banyaknya Masyarakat yang tidak memahami mekanisme perijinan Ketika ingin membuka usaha, bahkan mereka saja tidak memahami tentang NPWP, hal ini menunjukkan pentingnya Perda
--	--

		<p>Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko ini diterbitkan agar kami sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan pengawasan atas Perda tersebut.</p>
Kementerian Investasi/BKPM (Sri Moertiningroem)		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka mencapai target investasi maka kepastian hukum sangat diperlukan salah satunya dukungan dengan adanya aturan hukum atau Perda. - Selain kepastian hukum dalam bentuk Perda maka perlu juga adanya pemberian insentif kepada UMKM karena salah satu kendala Masyarakat khusus nya Masyarakat bawah terkait dengan membuka usaha adalah ketiadaan modal, maka penting adanya pemberian insetif terhadap para UMKM, pemberian insetif ini dapat merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah - Selanjutnya perlu adanya pendampingan kepada Masyarakat dari proses awal perijinan hingga mereka mendapatkan perijinan. - Berdasarkan data kami Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai investasi tinggi bahkan lebih tinggi dari Kota Balikpapan namun dalam APBD nya lebih rendah dari Kota Balikpapan, atas kondisi ini maka perlu adanya promosi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara agar meningkatkan APBD nya. -
Kementerian Investasi/BKPM (Ivon)		<ul style="list-style-type: none"> - Kami sudah membaca secara sekilas terkait draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Resiko, secara umum sudah cukup bagus. - Acuan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko berpijak pada Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, dan pada saat ini PP 5 sedang dalam proses revisi dan ada beberapa pasal krusial yang mengalami perubahan

		<p>Tata Kelola dan proses yang ada di Daerah sehingga kami menyarankan untuk menunda pengesahan raperda ini terlebih dahulu, hingga ada hasil revisi PP 5 tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam 5 hari kerja sudah harus terbit sehingga perlu ada rincian dalam proses selama 5 hari kerja.
Ketua Pansus DPRD Kab. Kutai Kartanegara (Eko Wulandaru)		<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembuatan Raperda ini sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kami sudah beberapa kali melakukan rapat kerja dengan berbagai dinas dan instansi, dengan adanya informasi terkait adanya proses revisi Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 ini, bisa menjadi kendala juga dalam pengesahannya, namun ini nanti akan kami rapatkan kembali dengan internal DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. - Kami juga akan memasukkan unsur muatan lokal dalam Raperda ini untuk memastikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat terkait unsur-unsur lokal yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kementerian Investasi/BKPM		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Investasi/BKPM ada memiliki aturan yaitu Peraturan Kementerian Investasi No 1 tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. - Ada program memitrakan usaha besar dengan UMKM, kemudian UMKM yang dimitrakan adalah UMKM daerah sehingga bisa membangkitkan UMKM, jika tidak ada usaha besar di wilayah kabupaten maka bisa diambil 1 wilayah provinsi yang sama. - Dengan adanya kemitraan tersebut kita bisa mengfokuskan kepada kebutuhan UMKM seperti pendanaan.
DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara (Bahauddin)		<ul style="list-style-type: none"> - Apakah judul perda ini sudah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, karena

		<p>di PP tersebut ada mengatur mengenai perizinan di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 sebenarnya sudah mengatur secara lengkap bahkan sangat detail hingga ke hal-hal yang bersifat teknis, sehingga Draft Perda ini mungkin dapat dipelajari lebih lanjut. - Perda pemberian insentif dan kemudahan berusaha sudah di sahkan oleh DPRD. - Fokus dalam hilirisasi bisa dipilih Industri, Batu Bara, CPO sawit dan Perikanan. - Dari sekian UMKM yang telah ber NIB sekitar 48.000 - Perkebunan CPO sudah di integrasikan dengan Bumdes - Kalo dari pertambangan kan banyak para pekerja atau karyawan
Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara (Muhammad Hidayat)		<ul style="list-style-type: none"> - Didaerah kami ada sektor pertambangan - IPR dan IPK dan Undang-undang pertambangan - Perpres 55 tahun 2022 - Pertambangan - SPPL saja untuk ijin lingkungan
		-